



SIDARLIN: Evaluasi Implementasi *E-Government* dalam Pelayanan Publik pada Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur

Ardiyanto Dapadeda^{1*}, Andi Wahyu Rahardjo Emanuel² 

^{1,2} Magister Informatika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 28, 2023

Accepted October 13, 2023

Available online October 25, 2023

Kata Kunci:

E-Government, Disdukcapil, Pelayanan Publik

Keywords:

E-Government, Disdukcapil, Public Service



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini merinci permasalahan utama yang melibatkan kurangnya kepuasan dan pemanfaatan aplikasi SIDARLIN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Timur. Masalah utama yang diidentifikasi mencakup kesalahan penggunaan aplikasi, keterbatasan perangkat, dan kekurangan sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas SIDARLIN digunakan oleh masyarakat dan Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur dalam implementasi *E-Government*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang menghambat pemanfaatan aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang dihadapi oleh SIDARLIN di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIDARLIN di Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur tidak memuaskan. Aplikasi ini tidak memberikan layanan publik sesuai harapan dan menghadapi sejumlah masalah, termasuk kesalahan penggunaan, keterbatasan perangkat, dan kekurangan sumber daya manusia. Berdasarkan data Disdukcapil, hanya sekitar 0.5% dari total penduduk yang menggunakan aplikasi SIDARLIN setiap tahun, mencerminkan adopsi yang rendah dan menunjukkan kekurangan yang signifikan dalam implementasi SIDARLIN. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi urgensi perbaikan aplikasi SIDARLIN dan perlunya peningkatan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam mengadopsi layanan *E-Government*. Rekomendasi perbaikan teknis pada SIDARLIN, peningkatan pelatihan untuk pengguna dan staf Disdukcapil, serta kampanye penyuluhan kepada masyarakat dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dan adopsi aplikasi *E-Government* di tingkat lokal.

ABSTRACT

This study details the main problems involving the lack of satisfaction and utilization of the SIDARLIN application at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of East Sumba Regency. Key issues identified include misuse of the app, device limitations, and lack of human resources. The purpose of this study is to evaluate the extent to which the effectiveness of SIDARLIN is used by the community and Disdukcapil of East Sumba Regency in the implementation of *E-Government*. In addition, this study aims to identify barriers that hinder the utilization of such applications. This research uses a qualitative approach, with data collection carried out through literature studies relevant to the research topic. Data analysis was conducted descriptively to provide a comprehensive picture of the situation faced by SIDARLIN at the local level. The results showed that the use of SIDARLIN in Disdukcapil East Sumba Regency was not satisfactory. The app did not deliver public services as expected and faced a number of issues, including misuse, device limitations, and lack of human resources. Based on Disdukcapil data, only about 0.5% of the total population uses the SIDARLIN application each year, reflecting low adoption and showing significant shortcomings in SIDARLIN implementation. The implications of this study underscore the urgency of improving the SIDARLIN application and the need to increase public understanding and participation in adopting *E-Government* services. Technical improvement recommendations on SIDARLIN, improved training for Disdukcapil users and staff, and community outreach campaigns can be concrete steps to increase the effectiveness and adoption of *E-Government* applications at the local level.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Selain menyediakan pelayanan, tanggung jawab pemerintah juga meliputi pembangunan dan perlindungan. Keyakinan masyarakat pada pemerintah menurun karena banyak layanan publik saat ini tidak memenuhi harapan (Marzuki, 2020; Nurul et al., 2021; Shafira & Kurniasiwati, 2021). Banyak orang menghadapi kesulitan mendapatkan informasi, prosedur pelayanan yang rumit, dan keterbatasan sarana dan prasarana (Eko et al., 2023; Mayowan, 2016; Nurul et

*Corresponding author.

E-mail addresses: dapadeda19ardhyanto@gmail.com (Ardiyanto Dapadeda)

al., 2021). Untuk menjadi lebih efektif dan efisien, masyarakat membutuhkan sistem pelayanan modern yang berbasis digital. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mendukung penerapan E-Government sebagai kebijakan dan strategi nasional (Eko et al., 2023; Maria et al., 2022; Rahmadi et al., 2019).

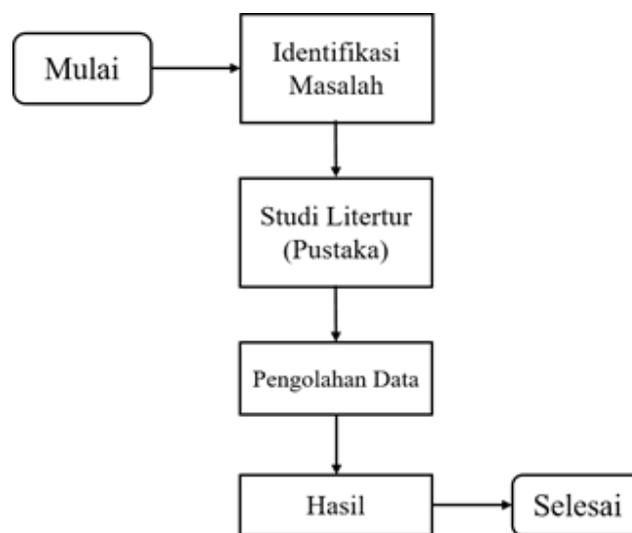
E-Government adalah cara baru bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi, terutama internet (Antoni et al., 2021; B. Irawan, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan pemerintahan secara efisien dan memberikan layanan yang transparan dan memuaskan bagi masyarakat. Selain itu, E-Government adalah aplikasi teknologi elektronik dan layanan web yang bertujuan untuk menyediakan, bertukar, dan meningkatkan layanan pemerintah kepada warga negara dan bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas sambil mengurangi biaya (Jalma et al., 2019; Pamungkas et al., 2020; Tui et al., 2022). Definisi E-Government adalah Tindakan yang bertujuan memperluas penggunaan teknologi elektronik dalam mengelola Pemerintahan untuk menyediakan informasi dan layanan kepada masyarakat (Choirunnisa et al., 2023; E. P. Irawan, 2017). Implementasi E-Government diharapkan dapat mengubah semua aktivitas pemerintahan menjadi proses elektronik, mempermudah tugas kebijakan dan pelayanan (Deswanto et al., 2021; Purba et al., 2019). Secara sederhana, E-Government adalah penyelenggaraan Pemerintahan dengan pemanfaatan inovasi teknologi berbasis elektronik. Tujuan dari E-Government adalah untuk meningkatkan hubungan masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, berbagai tingkatan pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah menerapkannya (Jalma et al., 2019; Pamungkas et al., 2020; Shafira & Kurniasiwati, 2021). Contohnya Layanan publik seperti Disdukcapil Kab. Sumba Timur meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Online (SIDARLIN) pada 2 Agustus 2022, dengan dukungan dari Bupati Kabupaten Sumba Timur. SIDARLIN adalah aplikasi online yang membantu orang mendaftar dan mengajukan dokumen kependudukan yaitu : Kartu Keluarga, E-KTP, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan Kartu Identitas Anak. Mereka juga dapat mencetak dokumen tanpa harus pergi ke kantor Dukcapil.

Lembaga pemerintahan saat ini harus bergantung pada teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif (Nur, 2014; Pamadi et al., 2022; Wirawan, 2020). Penelitian ini berfokus pada mengevaluasi hasil implementasi E-Government melalui SIDARLIN pada Disdukcapil Kab. Sumba Timur. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan SIDARLIN. Faktor-faktor termasuk sinyal yang tidak stabil di wilayah Kabupaten Sumba Timur serta keterbatasan sumber daya manusia dan perangkat seperti laptop dan handphone. Selain itu, versi mobile aplikasi SIDARLIN tidak tersedia di Playstore dan Appstore. Pengguna handphone menghadapi kesulitan mengaksesnya melalui website Disdukcapil menggunakan Google Chrome. Hal ini dapat membingungkan masyarakat yang belum terbiasa dengan metode ini. Dalam situasi ini, masalah dari latar belakang di atas dirumuskan sebagai fasilitas Internet yang tidak merata dan buruk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya prasarana dan sarana pendukung. Jadi, fokus penelitian ini adalah apakah aplikasi SIDARLIN telah memenuhi fungsi dan tujuan yang diharapkan? Apa saja hambatan yang menghalangi pemanfaatan aplikasi SIDARLIN? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif masyarakat dan Disdukcapil Kab. Sumba Timur menggunakan aplikasi SIDARLIN untuk menerapkan E-Government. Studi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah menerapkan E-Government.

Studi-studi sebelumnya mengenai E-Government telah banyak dilakukan, seperti kasus : Implementasi Electronic Government: Studi Kasus pada Aplikasi SILPa KAMI di Pemerintah Kota Cimahi; Efektivitas Implementasi E-Budgeting Dalam Mewujudkan Good Governance Dengan Model CIPP (Studi Kasus Pada Kota Surabaya); Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah; Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone; Implementasi E-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Amrozi et al., 2022; Deswanto et al., 2021; Kurniawan et al., 2022; Noviyanti et al., 2021; Rafiqi & Selviyanti, 2021). Penelitian-penelitian sebelumnya ini fokus pada aplikasi seperti SILPa KAMI, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Platform SOBAT DUKCAPIL, dan juga membahas implementasi E-Government secara umum di tingkat Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan E-Government melalui Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Online (SIDARLIN) di Disdukcapil Kab. Sumba Timur. Studi ini mengevaluasi pengaruh aplikasi SIDARLIN terhadap kinerja Disdukcapil dalam penggunaan teknologi informasi karena aplikasi ini baru diluncurkan satu tahun lalu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara menyeluruh berbagai fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena dengan kata-kata dan menggunakan konteks alamiah (Eko et al., 2023; Herman & Fanida, 2023). Data dikumpulkan melalui studi literatur, dengan mengumpulkan informasi dari sumber, seperti jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Sebaliknya, analisis data menggunakan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan literatur dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian (Arianto, 2021; Kosali, 2021). Penelitian ini menggunakan referensi dari laporan dan arsip disdukcapil Kabupaten Sumba Timur, yang dianalisis secara kualitatif, sebagai sumber pustaka (Eko et al., 2023; Ridoh & Putra, 2021). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan data yang dikumpulkan melalui pendekatan pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Identifikasi masalah, studi literatur, analisis dan pengolahan data, hasil, dan penarikan kesimpulan adalah semua metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari arsip dan laporan Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Arianto, 2021; Herman & Fanida, 2023). Gambar 1 menunjukkan alur penelitian.



Gambar 1. Website DISDUKCAPIL Kab. Sumba Timur

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

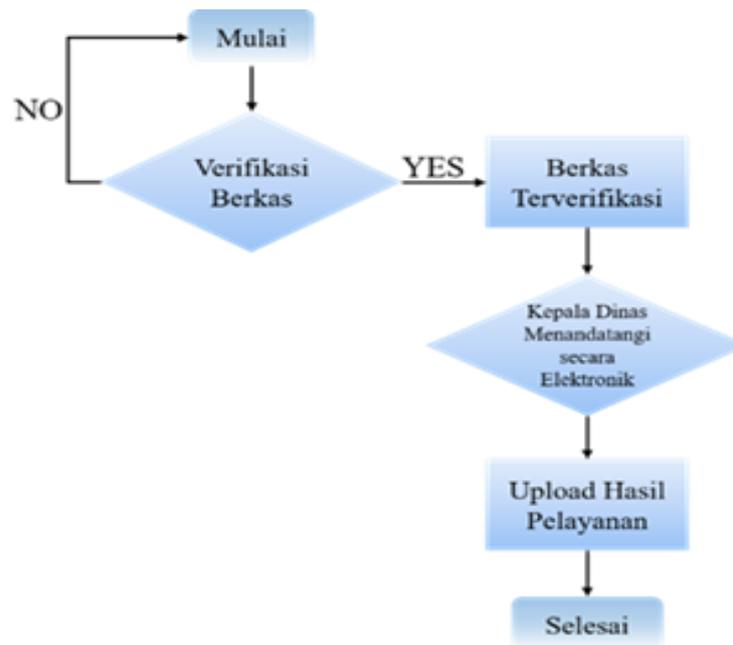
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, serta tugas dan fungsinya, serta Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur (Djoh, 2018; Kulandima et al., 2021). Selain itu, tanggung jawab Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur adalah menetapkan kebijakan teknis untuk adminduk dan capil, menerapkan kebijakan tersebut, melakukan evaluasi dan pelaporan, dan melakukan administrasi dinas sesuai dengan tanggung jawabnya. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut: Pelayanan pendaftaran penduduk, yang mencakup pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran dan Akta Kematian; Pelayanan pencatatan sipil, yang mencakup pencatatan sipil bagi pasangan yang menikah untuk memperoleh status hukum negara; dan Pelayanan pengaduan masyarakat dan pemberian informasi.

Dokumen kependudukan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berfungsi sebagai bukti legal dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Stella & Rohman, 2019; Tornado & Rokhim, 2023). Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum mencapai target nasional karena letak geografis dan populasi 261.130 warga Kabupaten Sumba Timur. Karena itu, untuk mendekati layanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur mengembangkan SIDARLIN, sebuah sistem aplikasi berbasis web.

Tujuan adanya SIDARLIN mencakup beberapa hal yaitu: 1) Tersedianya sistem layanan online dan terintegrasi memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil secara cepat dan hemat biaya. 2) Meminimalisir pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui Calo/Pungli dan antrian yang lama. 3) Pemberdayaan pemerintahan Desa/Kelurahan melalui layanan administrasi kependudukan di kantor Desa/Kelurahan.

Aplikasi SIDARLIN dibuat oleh Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur untuk membantu masyarakat dan petugas Disdukcapil mengelola administrasi kependudukan. Aplikasi ini meningkatkan kinerja Disdukcapil dalam mengelola dokumen administrasi kependudukan dan memungkinkan masyarakat untuk melakukannya dari mana dan kapan saja dengan koneksi internet. Sepanjang semester I (Januari hingga Juni 2023), 1.360 orang telah menggunakan Aplikasi SIDARLIN, menurut data dari Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur. Anda dapat mengakses aplikasi SIDARLIN melalui URL: <https://dukcapionline.sumbatimurkab.go.id>. Standar prosedur operasional Sistem Pendaftaran Online (SIDARLIN) Disdukcapil Kab. Sumba Timur pada Gambar 2. Tabel 2 menunjukkan peningkatan kinerja setelah penggunaan aplikasi SIDARLIN, yang mengubah pelayanan publik di Kabupaten Sumba Timur.



Gambar 2. Alur Proses Aplikasi SIDARLIN

Tabel 1. Penjelasan Alur Proses Aplikasi SIDARLIN

Proses	Keterangan	Waktu
Mulai	Pengguna layanan masuk aplikasi web, daftar <i>user</i> /login <i>user</i> , pilih jenis layanan sesuai kebutuhan dan mengupload berkas sesuai persyaratan	-
Verifikasi Berkas	Operator Menerima dan melakukan verifikasi kesesuaian berkas permohonan dengan persyaratan, jika sesuai dilanjutkan untuk diinput namun apabila tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi sesuai aturan yang berlaku	5 Menit
Berkas Terverifikasi	Petugas Melakukan verifikasi dokumen secara elektronik untuk diajukan penandatanganan secara elektronik kepada Kepala Dinas	5 Menit
Penandatanganan Kepala Dinas Secara Elektronik	Kepala Dinas Menyetujui permohonan dan menandatangani secara elektronik	2 Menit
Upload Hasil	Petugas Mengupload hasil layanan sesuai kebutuhan pemohon dan memberitahukan kepada pengguna layanan bahwa dokumen siap dicetak	5 Menit
Selesai	<i>User</i> melakukan pencetakan dokumen sesuai kebutuhan permohonan yang telah di tandatangani secara elektronik	1 - 24 jam Tergantung jaringan

Tabel 2. Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi Aplikasi SIDARLIN

Kondisi Sebelum Implentasi	Kondisi Setelah Implementasi
Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan melaporkan dokumen kependudukan	Pemrosesan dan pelaporan dokumen kependudukan cukup cepat
Antrian masyarakat yang lama dan menumpuk saat mengurus dokumen kependudukan secara offline.	Berkurangnya jumlah antrian masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan secara offline
Tumpang tindihnya tugas dan fungsi pengurusan dokumen kependudukan oleh setiap seksi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan DISDUKCAPIL	Pelayanan yang diberikan oleh setiap seksi di bidang pengelolaan informasi administrasi kepada penduduk DISDUKCAPIL tidak terbatas
Lambatnya penanganan pengaduan masalah terkait dokumen kependudukan	Penanganan pengaduan masalah terkait dokumen kependudukan lebih responsif

Namun, dalam pengimplementasian aplikasi SIDARLIN pada Disdukcapil Kab. Sumba Timur, masih mengalami berbagai kendala dan hambatan seperti: 1) Jaringan internet pada Kabupaten Sumba Timur yang kurang baik, kurang stabil dan belum merata keseluruhan wilayah pedesaan. Hal inilah yang menjadi kendala utama masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online. Jika terjadi gangguan pada jaringan, maka penginputan data juga terhambat, mengakibatkan gangguan, penundaan, bahkan kegagalan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan yang mengakibatkan lamanya waktu bahkan kegagalan dalam memasukkan data ke dalam sistem. 2) Implementasi aplikasi SIDARLIN dalam layanan kurang optimal karena banyaknya masyarakat yang belum terbiasa dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Akibatnya, mereka lebih memilih datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pengurusan dokumen secara tatap muka. 3) Waktu operasional pelayanan aplikasi SIDARLIN terbatas, hanya berlangsung dari jam 08.00 hingga 15.00 WITA sesuai dengan jam kerja. Jika ada permintaan setelah jam kerja, akan ditangani oleh petugas pada hari berikutnya. Pembatasan waktu operasional dalam layanan online mengakibatkan keterbatasan bagi masyarakat dalam memilih waktu untuk mengurus dokumen kependudukan. Hanya ada satu tenaga Operator yang bertanggung jawab dalam proses pendaftaran dan permohonan dokumen kependudukan. 4) Hanya ada satu orang pegawai di Disdukcapil yang memiliki pemahaman mendalam tentang layanan teknologi informasi pada aplikasi SIDARLIN, meskipun ada beberapa pegawai lain di sana. Hal ini menyebabkan penumpukan permintaan karena banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan panduan tentang proses pengurusan dokumen kependudukan secara online. Pegawai yang kurang paham tentang sistem pelayanan aplikasi SIDARLIN di Disdukcapil mendelegasikan tugas kepada mereka yang benar-benar menguasai sistem tersebut. 5) Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dikarenakan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan. 6) Kurangnya Sarana Prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan & Pencatatan Sipil dikarenakan Anggaran yang belum memadai sebagai penunjang pelayanan administrasi kependudukan.

Pembahasan

Penelitian ini merinci sejumlah kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (SIDARLIN) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Timur. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan aplikasi E-Government tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu mengambil langkah-langkah strategis yang mendalam dan berfokus pada aspek-aspek kunci. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kepuasan dan pemanfaatan SIDARLIN oleh masyarakat, yang tercermin dari tingkat penggunaan yang rendah, sekitar 0.5% dari total penduduk Kabupaten Sumba Timur setiap tahun. Sebagai respons atas kendala tersebut, strategi sosialisasi menjadi langkah krusial. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pendekatan multi-channel, termasuk distribusi brosur, pemasangan banner, spanduk, baliho, serta penyelenggaraan pelatihan langsung di lapangan. Informasi mengenai SIDARLIN juga perlu dipromosikan melalui akun media sosial resmi Disdukcapil dan situs web resmi Kabupaten Sumba Timur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara menggunakan SIDARLIN, memperkuat partisipasi mereka dalam pemanfaatan aplikasi, dan mengatasi kurangnya kesadaran akan manfaat SIDARLIN (Kosali, 2021; Shafira & Kurniasiw, 2021).

Peningkatan kualitas aplikasi SIDARLIN menjadi hal yang sangat penting. Diperlukan pembaruan dan inovasi yang berkesinambungan untuk menjawab tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan aplikasi harus tidak hanya berfokus pada penambahan fitur, tetapi juga pada peningkatan antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan mudah digunakan (Eko et al., 2023; I. A. Amrouni

et al., 2019). Upaya ini memerlukan kolaborasi erat antara tim pengembang aplikasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat yang menjadi pengguna utama SIDARLIN.

Masalah keterbatasan perangkat dan kekurangan sumber daya manusia menjadi hambatan nyata yang perlu diatasi. Pelatihan kinerja bagi sumber daya manusia, khususnya pegawai dan operator Disdukcapil, menjadi solusi terpenting. Program pelatihan harus mencakup panduan teknis dalam penggunaan SIDARLIN serta strategi peningkatan pelayanan publik secara efisien melalui aplikasi tersebut. Diperlukan juga pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pegawai untuk memastikan penerapan SIDARLIN berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Pamadi et al., 2022; Wirawan, 2020).

Alokasi anggaran untuk operasional SIDARLIN perlu diperhatikan dengan serius. Anggaran yang memadai akan memastikan kelancaran operasional aplikasi, pembaruan rutin, dan pelaksanaan program pelatihan kinerja. Keberlanjutan SIDARLIN sebagai alat yang efektif dalam pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis aplikasi, tetapi juga pada dukungan finansial yang memadai dari pemerintah daerah.

Peran strategis E-Government dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Implementasi SIDARLIN dapat menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk mengoptimalkan pelayanan publik secara keseluruhan. E-Government memungkinkan proses administrasi dan pelayanan publik dilakukan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses manual. Dengan SIDARLIN, data dan informasi dapat diakses dengan lebih efektif dan terintegrasi, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit pemerintah (I. A. Amrouni et al., 2019; Pamungkas et al., 2020).

Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam E-Government melalui SIDARLIN untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi internal dalam pelayanan publik. Center Management System (CMS), Risk Management Information System (RMIS), Document Management System (DMS), dan Interactive Government Information System (IGIS) adalah alat yang dapat diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur. Melalui aplikasi teknologi ini, informasi dapat dikelola secara terpusat, risiko dapat diidentifikasi dan dikelola, dokumen dapat diatur dan diakses dengan lebih transparan, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat ditingkatkan (Arianto, 2021; Pamungkas et al., 2020).

Dengan mempertimbangkan implementasi E-Government di suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa evaluasi penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan Disdukcapil Kab. Sumba Timur melalui Aplikasi SIDARLIN ini, sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien implementasi E-Government dalam meningkatkan pelayanan publik serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan lembaga pemerintah. Selain itu, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tantangan penerapan E-Government, khususnya tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Salah satu manfaat penerapan Aplikasi SIDARLIN adalah potensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan. Oleh karena itu, ini dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.

Disdukcapil Kab. Sumba Timur harus merancang dan membuat aplikasi SIDARLIN berbasis Android yang tersedia di Appstore dan Playstore. Aplikasi ini harus dibuat sehingga pengguna hanya perlu mendownloadnya dan langsung terkoneksi dengan akun pengguna di smartphone mereka, sehingga lebih efisien dalam penggunaan. Untuk mengintegrasikan situs web Disdukcapil Kab. Sumba Timur dengan situs web kabupaten itu sendiri, serta mengintegrasikan aplikasi SIDARLIN dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk mencapai tujuan integrasi pelayanan publik digital dari Disdukcapil Kab. Sumba Timur.

4. SIMPULAN

Implementasi SIDARLIN di Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur menghadapi kendala, termasuk rendahnya kepuasan dan pemanfaatan oleh masyarakat. Strategi sosialisasi, peningkatan kualitas aplikasi, pelatihan sumber daya manusia, dan alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. E-Government melalui SIDARLIN dianggap sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi layanan publik digital untuk meningkatkan administrasi kependudukan di daerah tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

Amrozi, Y., Devi, E. C., & Rosida, L. A. (2022). Implementasi E-Government Pelayanan Publik Pada Aplikasi E-Kios Implementation E-Government Of Public Services On E-Kios Application. *Application. Jurnal*

- Kebijakan Publik*, 13(3), 310–316. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8015>.
- Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1652–1659. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i4.3318>.
- Arianto, F. P. (2021). Perancangan Sistem Informasi E-Document Sebagai Implementasi E-Government. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*, 2(1), 144–150. <https://doi.org/10.33365/jatika.v2i1.736>.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>.
- Deswanto, R., Ningsih, S. A., Ilmu, M., Universitas, P., & Buton, M. (2021). Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 43–50. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1525>.
- Djoh, D. A. (2018). Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Tani di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 2(4), 332–339. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2018.002.04.8>.
- Eko, M., Kusuma, A., & Wardoyo, B. (2023). Implementasi E-Government Pada Platform Karirhub. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 131–139. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8188>.
- Herman, B. S., & Fanida, E. H. (2023). Implementasi Electronic Government Pada Aplikasi Sistem Informasi Guru Tulungagung Belajar (Sigutajar) Di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 11, 2477–2490. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p>.
- I. A. Amrouni, K., A. Arshah, R., & J. Kadi, A. (2019). A Systematic Review: Factors Affecting Employees' Adoption of E-government Using an Integration of UTAUT & TTF Theories. *KnE Social Sciences*, 2019, 54–65. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5044>.
- Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 174–201. <https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.351>.
- Irawan, E. P. (2017). Pemanfaatan Website Pada Aktivitas Cyber PR dalam Mendukung e-Government di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 19(2), 163–177. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.19.2.2017.163-177>.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>.
- Kosali, A. Y. (2021). Pengaruh Implementasi Electronic Government (E- Government) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.58437/mim.v10i1.51>.
- Kulandima, U. R. P., Kurniawati, L., & Indrayani, E. (2021). Implementasi Kebijakan Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 233–246. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.429>.
- Kurniawan, I. A., Yusman, D., Kultsum, G. U., & Junianto, A. (2022). Implementasi E-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Studi Kasus Platform Sobat Dukcapil). *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 256–265. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5476>.
- Maria, A., Hariyati, S., Nurayuni, I., Syarifatus, I., & Rina, A. (2022). Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 203–208. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.360>.
- Marzuki, A. (2020). Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 183–199. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.
- Mayowan, Y. (2016). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa (studi kasus di kabupaten Lamongan). *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 14–23. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2>.
- Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., Ayu, A. A., & Larantika, D. (2021). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Implementasi E - Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (PAD). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96>.
- Nur, E. (2014). Penerapan e-government publik pada setiap skpd berbasis pelayanan di kota palu. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 18(3). <https://doi.org/10.33299/jpkop.18.3.331>.

- Nurul, W. D., Ramdani, R., Nasir, M., & Sudirman, F. A. (2021). Implementasi Aplikasi SiCANTIK pada Dinas PMPTSP Kota Kendari: Tinjauan E-Government. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305>.
- Pamadi, J. D. P., Dewi, D. S. K., & Dj, E. W. (2022). Evaluasi Implementasi E-Government Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ponorogo. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 756–768. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2855>.
- Pamungkas, A. R., Nugroho, L. E., & Sulisty, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur Evaluation Of Information System Failure Factors On Readiness Of E-Government Implementation: A Literature Review. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 3(3), 143–152. <https://doi.org/10.33387/jiko>.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementation of the Population Administration information system in electronic Resident card management. *PERSPEKTIF*, 8(2), 77–83. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597>.
- Rafiqi, I., & Selviyanti, N. H. (2021). Efektivitas Implementasi E-Budgeting Dalam Mewujudkan Good Governance Dengan Model CIPP (Studi Kasus Pada Kota Surabaya). *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 1(2), 115–138. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v1i2.381>.
- Rahmadi, A. N., Jibril, M., & Muhammad, A. (2019). Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Implementation Of E-Government In Probolinggo (Study Of Presidential Regulation Number 95 Of 2018 Concerning Elect. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(3), 179–189. <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i3.8002>.
- Ridoh, A., & Putra, Y. I. (2021). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Dokumen Layanan Publik Berbasis Web untuk Mempermudah Masyarakat Memperoleh Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bungo. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4227–4235. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1525>.
- Shafira, A., & Kurniaswi, A. (2021). Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 52–68. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457>.
- Stella, M., & Rohman, A. (2019). Strategi Pelayanan Administrasi E-KTP Dalam Kajian Kepuasan Pelayanan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(2), 12–19. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i2.1608>.
- Tornado, H. A., & Rokhim, A. (2023). Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(1), 40–48. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i1.7223>.
- Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 254–263. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.338>.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.